



SOAL DUGAAN PUNGLI

Disdik Yogya Panggil 20 Sekolah

YOGYA (KR) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Yogyakarta melakukan pemanggilan kepada 20 sekolah jenjang SD hingga SMA negeri yang tercatat dalam data Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) Pusat untuk dimintai klarifikasi dan penjelasan. Pemanggilan tersebut dilakukan lantaran 20 sekolah ini masuk dalam data sekolah yang diperiksa BPKP terkait kasus terjadinya pungutan liar (Pungli) saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan mekanisme selanjutnya.

Meski terdata, namun dari hasil klarifikasi yang telah dilakukan kepala sekolah dari 20 sekolah tersebut, Disdik tidak menemukan indikasi pungli di sekolah masing-masing. Bahkan Disdik menyatakan kesiapannya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dari auditor BPKP secara menyeluruh yang berlangsung hingga Jumat (26/8).

Kepala Disdik Kota Yogya, Heri Edi Suasana kepada wartawan, Kamis (4/8) menuturkan, dari hasil pemanggilan 20

kepala sekolah pada Rabu (3/8) lalu, tidak ditemukan bukti riil indikasi terjadinya pelanggaran berupa pungli yang dibebankan kepada orangtua siswa. Seluruh kepala sekolah tersebut sepakat, sekolah mematuhi berbagai aturan yang berlaku mulai dari Peraturan Walikota (Perwal), Keputusan Walikota (Kepwal) hingga Surat Edaran (SE) larangan sekolah memungut dana dari orangtua siswa.

"Kami yakin dan berharap kasus pungli sekolah di DIY seperti yang diumumkan

kan Kemendiknas, tidak terjadi. Pada prinsipnya kami dari Kota Yogya siap diperiksa," tegas Edi.

Edi mengaku tidak hafal menyebutkan satu persatu sekolah yang dipanggil tersebut, namun dari 20 sekolah negeri di Kota Yogya ada sebagian yang merupakan Sekolah Berstandar Internasional (SBI) dan sekolah yang tergolong favorit. Sekolah tersebut di antaranya SDN Ungaran 1, SMAN 1, SMAN 3 dan SMAN 6.

Edi juga menambahkan, berdasarkan informasi yang didapat, wali murid di SMPN 2 mengumpulkan iuran untuk membeli LCD guna menunjang pembelajaran secara optimal. Setelah Disdik melakukan klarifikasi ke sekolah ternyata iuran wali murid ini tidak dikoordinasikan sekolah, namun murni merupakan inisiatif wali murid tanpa ada campur tangan sekolah, kepala sekolah bahkan Komite Sekolah. (M-1)-s

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005